

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PONOROGO

Suhartini⁽¹⁾, Heru Santoso⁽¹⁾, Imaniar Ilmi Pariasa⁽¹⁾, Dwi Retno Andriani⁽¹⁾,
Manggala Ismanto⁽²⁾

⁽¹⁾ Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

⁽²⁾ Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya

E-mail: hartiniub@yahoo.com, pariasa_17@yahoo.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan penting di Indonesia dan di Kabupaten Ponorogo pada khususnya. Angka kemiskinan di Indonesia memang menurun dari 24% pada 1999 menjadi 11,4% pada awal 2013, namun tingkat penurunan kemiskinan tersebut mulai melambat. Pada tahun 2012 dan 2013, kemiskinan turun hanya sebesar 0,5% tiap tahun, terkecil dalam dekade terakhir. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2014), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo sendiri pada tahun 2013 masih berada di bawah garis rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia terutama Jawa Timur dengan jumlah mencapai 102.600 jiwa. Jumlah ini mengalami fluktuasi sejak tahun 2007 sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan demikian masalah kemiskinan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, akan tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari setiap daerah, apalagi permasalahan-permasalahan kemiskinan dialami oleh hampir semua daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Sebagai upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, Pemerintah Indonesia mencanangkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang dipadukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan dasar UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. SNPK mengacu pada kesepakatan Indonesia saat menandatangani deklarasi Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs) pada September tahun 2000, yang diantaranya bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan di targetkan pada tahun 2015 dapat mengalami penurunan sejumlah setengah dari angka kemiskinan tahun 1999. Sebagai wujud pencapaian Millenium Development Goals maka pendekatan yang digunakan dalam SNPK adalah pendekatan berbasis hak, meliputi hak atas pangan, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha, tanah, air bersih, sumberdaya dan lingkungan hidup, berpartisipasi, rasa aman, dan hak atas perumahan.

Sejalan dengan SNPK maka setiap daerah kabupaten/ kota harus memiliki Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang bertujuan agar bisa menjadi bahan acuan untuk berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang terjadi di daerah sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia. Penyusunan SPKD ini merupakan amanat dari UU No. 17 / 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang kemudian dituangkan ke dalam Perpres No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah,

dan Permendagri nomor 42/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota .

Strategi penanggulangan kemiskinan setiap daerah memang harus spesifik karena penyebab terjadinya permasalahan kemiskinan beraneka ragam diantaranya adalah keterbatasan penguasaan sumberdaya seperti lahan dan modal, keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha, rendahnya tingkat pendidikan dan penyebab-penyebab lainnya. Kabupaten Ponorogo memiliki masalah kemiskinan yang lebih spesifik, antara lain terdapat “kampung Idiot”, miskin dan penderita gangguan jiwa/penyakit kronis spesifik (kanker, tumor, gagal ginjal, leukimia, thalasemia, dll), keluarga fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, penyandang cacat, korban bencana alam/sosial/teknologi dan pengemis. Oleh karena itu dilakukan kajian mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo yang bertujuan : (1) mengidentifikasi keadaan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dan (2) merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Ponorogo yang sinergis diantara berbagai instansi dan stakeholder yang terkait. Kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dengan melihat pada akar permasalahan penyebab terjadinya kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan ini telah dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo tahun 2015 karena Kabupaten Ponorogo merupakan Kabupaten/ Kota yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Timur. Metode pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan dilakukan secara *purposive* melalui wawancara key informan, observasi dan studi kasus di daerah utama yang menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Ponorogo serta Focused Group Discussion (FGD) kepada para stakeholder terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dan diolah menggunakan metode analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria keluarga miskin menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN didasarkan pada kriteria keluarga yang dibuat dalam 5 (lima) tahapan, yaitu “keluarga prasejahtera”, “keluarga sejahtera tahap I”, “keluarga sejahtera tahap II”, “keluarga sejahtera tahap III”, dan “keluarga sejahtera tahap III plus”. Keluarga miskin adalah keluarga-keluarga yang pada pendataan keluarga secara lengkap (sensus) adalah “keluarga prasejahtera” dan “keluarga sejahtera tahap I”.

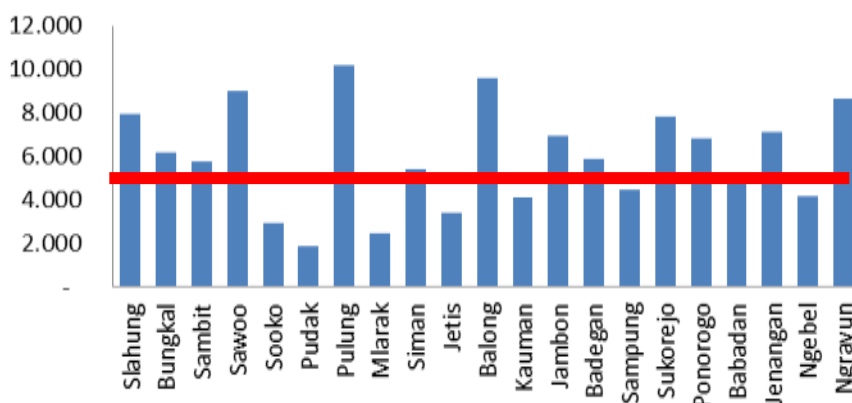
Berdasarkan hasil rincian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang telah dilakukan oleh PLKB di setiap kecamatan maka, berikut adalah jumlah keluarga miskin berdasarkan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Ponorogo tahun 2013:

Tabel 1. Banyaknya Keluarga Dirinci Menurut Kelompok Sejahtera Setiap Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2013

No	Kecamatan	Keluarga	Jumlah Kel. Miskin Berdasar Kesejahteraan (Pra Sejahtera + Sejahtera I)	Prosentase Kemiskinan (%)
1	Slahung	17218	7,937	46.10
2	Bungkal	12951	6,167	47.62
3	Sambit	13174	5,741	43.58
4	Sawoo	18446	9,002	48.80
5	Sooko	8478	2,891	34.10
6	Pudak	2976	1,874	62.97
7	Pulung	17526	10,207	58.24
8	Mlarak	8868	2,451	27.64
9	Siman	15781	5,396	34.19
10	Jetis	9959	3,361	33.75
11	Balong	15611	9,606	61.53
12	Kauman	14231	4,077	28.65
13	Jambon	13643	6,931	50.80
14	Badegan	9888	5,862	59.28
15	Sampung	14037	4,431	31.57
16	Sukorejo	17281	7,800	45.14
17	Ponorogo	23817	6,834	28.69
18	Babadan	19940	5,083	25.49
19	Jenangan	18524	7,113	38.40
20	Ngebel	7079	4,145	58.55
21	Ngrayun	17558	8,641	49.21
Rata-rata Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Ponorogo				43.54

Sumber: Survei PLKB *dalam* Profil Kecamatan di setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2014 (diolah)

Berdasarkan data banyaknya keluarga dirinci menurut kelompok sejahtera setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2013 maka kecamatan yang memiliki jumlah keluarga miskin tertinggi secara berurutan adalah kecamatan Pulung, Balong, Sawoo, Ngrayun dan Slahung. Berikut grafik penggambaran jumlah keluarga miskin berdasarkan kelompok kesejahteraan di seluruh kecamatan Kabupaten Ponorogo:



Gambar 1. Jumlah Keluarga Miskin Berdasar Kelompok Kesejahteraan (Pra Sejahtera + Sejahtera I)
Sumber: Survei PLKB dalam Profil Kecamatan di setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2014 (diolah)

Kecamatan Pulung memiliki jumlah keluarga sebanyak 10.201, sehingga merupakan kecamatan yang memiliki jumlah keluarga miskin paling banyak di Kabupaten Ponorogo. Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Balong sebanyak 9.606, Kecamatan Sawoo sebanyak 9.002, Kecamatan Ngrayun sebanyak 8.641 dan Kecamatan Slahung sebanyak 7.937. Sedangkan hasil rata-rata jumlah keluarga miskin dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo mencapai 5.979.

Berdasarkan besarnya nilai prosentase perbandingan jumlah keluarga terhadap jumlah keluarga miskin di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo maka secara berurutan kecamatan Pudak, Balong, Badegan, Pulung, Jambon dan Ngrayun merupakan Kecamatan yang memiliki prosentase keluarga miskin terbesar di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Pudak memiliki prosentase keluarga miskin sebesar 62,97%, sehingga merupakan kecamatan yang memiliki prosentase keluarga miskin terbesar di Kabupaten Ponorogo. Prosentase keluarga miskin di Kecamatan Balong sebesar 61,53%, Kecamatan Badegan sebesar 59,28%, Kecamatan Pulung sebesar 58,24%, Kecamatan Jambon sebesar 50,80% dan Kecamatan Ngrayun sebesar 49,21%. Sedangkan hasil rata-rata prosentase keluarga miskin berdasarkan kelompok kesejahteraan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo mencapai 43,54%. Keterangan: Desa bertanda merah merupakan desa dengan prosentase keluarga miskin terbanyak di kecamatan tersebut.

Idealnya daerah atau wilayah yang memiliki jumlah ataupun prosentase keluarga miskin terbesar harus mendapatkan penanganan khusus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di daerah tersebut. Berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima bantuan program kemiskinan di Kabupaten meliputi program Raskin, Jamkesmas, PKH dan BLSM maka Kecamatan yang menerima program terbanyak adalah Ngrayun dengan total 33.640 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Dalam perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo maka dilakukan penyusunan alternatif strategi menggunakan analisis SWOT dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE)

No	Evaluasi Faktor Internal (IFE)	Bobot	Peringkat	Skor
Kekuatan (S)				
1	Ketersediaan potensi sumberdaya (S1)	0.07	4	0.28
2	Budaya lokal (S2)	0.07	4	0.28
3	Jumlah angkatan kerja yang besar (S3)	0.04	3	0.12
4	Modal sosial masyarakat yang kuat (S4)	0.05	3	0.15
5	Kelembagaan-kelembagaan masyarakat (S5)	0.05	3	0.15
6	Ketersediaan pasar-pasar tradisional (S6)	0.04	3	0.12
7	Program penanggulangan kemiskinan (S7)	0.04	4	0.16
8	Fasilitas pendidikan dan kesehatan (S8)	0.04	3	0.12
9	Tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri (S9)	0.04	4	0.16
Jumlah skor kekuatan		0.44		1.54
Kelemahan (W)				
1	Pengembangan sektor pertanian (W1)	0.07	4	0.28
2	Kepemilikan dan penguasaan lahan (W2)	0.07	4	0.28
3	Pengembangan sektor non pertanian (W3)	0.07	4	0.28
4	Kesempatan kerja dan berusaha (W4)	0.04	4	0.16
5	Modal dan akses ke lembaga keuangan (W5)	0.05	3	0.15
6	Kualitas tenaga kerja dan sikap mental (W6)	0.05	3	0.15
7	Keterbatasan akses dan informasi pasar (W7)	0.06	4	0.24
8	Pengembangan dan inovasi produk (W8)	0.05	3	0.15
9	Infrastruktur (W9)	0.05	4	0.2
10	Anggaran penanggulangan kemiskinan di daerah (W10)	0.05	4	0.2
Jumlah skor kelemahan		0.56		2.09
Total		1		3.63
Selisih skor kekuatan dan kelemahan				-2.09

Tabel 4. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)

No	Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)	Bobot	Peringkat	Skor
Peluang (O)				
1	Dukungan dari Pemerintah (O1)	0.07	4	0.28
2	Alokasi dana desa (O2)	0.07	3	0.21
3	Program <i>land reform</i> (O3)	0.05	3	0.15
4	Pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019 (O4)	0.05	3	0.15
5	Pelibatan aktif perempuan petani/pekerja (O5)	0.05	3	0.15
6	Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi serta pasar dan kelembagaan pasar (O6)	0.05	3	0.15
7	Akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektar menjadi 2,0 hektar per KK tani (O7)	0.05	3	0.15
8	Pembangunan Agri-Bisnis Kerakyatan melalui Pembangunan Bank Khusus untuk Pertanian, UMKM, dan Koperasi (O8)	0.05	3	0.15
9	Sumber pendanaan (O9)	0.07	3	0.21
10	Potensi jumlah wisatawan (O10)	0.07	3	0.21
11	Lahan negara (O11)	0.03	3	0.09
12	Teknologi informasi (O12)	0.05	3	0.15
13	Peluang pasar (O13)	0.05	3	0.15
14	Fasilitas pendidikan dan kesehatan (O14)	0.06	4	0.24
15	Payung hukum (O15)	0.05	4	0.2
Jumlah skor peluang		0.82		2.64
Ancaman (T)				
1	Liberaliasasi perdagangan (T1)	0.05	4	0.2
2	Banyaknya pasar-pasar modern (T2)	0.04	4	0.16
3	Tingginya persaingan produk (T3)	0.04	3	0.12
4	Penguasaan sumberdaya dan sumber-sumber perekonomian (T4)	0.05	4	0.2
Jumlah skor ancaman		0.18		0.68
Total		1		
Selisih skor peluang dan ancaman				1.96

Tabel 5. Alternatif Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Strategi SO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan promosi budaya, pariwisata dan sumber daya alam melalui perkembangan teknologi informasi 2. Mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pengembangan pasar-pasar tradisional di Kabupaten Ponorogo
Strategi WO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah program-program, rumah tangga sasaran dan anggaran pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat dan provinsi 2. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan SDM yang bersifat partisipatif dan transparan dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan 3. Integrasi sektor pertanian, peternakan dan pariwisata 4. Pemberian subsidi pengadaan ternak dan perbaikan pakan ternak untuk mengembangkan sistem integrasi tanaman ternak 5. Mengembangkan budaya keunikan lokal seperti Reog sebagai icon Kabupaten Ponorogo dalam bentuk produk seperti souvenir, dll 6. Mengembangkan pasar tradisional dengan membuat pasar percontohan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa 7. Melatih TKI menjadi lebih profesional hingga aspek budaya 8. Pembentukan klaster-klaster pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi local 9. Pengoptimalan promosi menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan peluang pasar 10. Pengembangan budaya sampai munculnya kreatifitas (mendukung perkembangan industri kreatif) 11. Melakukan revolusi mental dengan mengubah kebiasaan menjadi budaya yang positif dan membangun kesadaran masyarakat yang kritis 12. Menentukan wilayah fokus penanggulangan kemiskinan tanpa meninggalkan wilayah yang lainnya 13. Peningkatan bantuan dan pelayanan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan/ permodalan 14. Meningkatkan kualitas dan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Ponorogo 15. Membuat pos anggaran tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Ponorogo
Strategi ST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadapi ketatnya persaingan produk melalui pengembangan industri kreatif yang memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah 2. Mengoptimalkan jumlah angkatan kerja dalam menghadapi perkembangan pasar modern dan liberalisasi pasar
Strategi WT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan layanan kesehatan dan pendidikan baik formal ataupun non formal dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja 2. Melakukan proteksi terhadap penguasaan sumber daya dan sumber-sumber perekonomian dari perusahaan besar atau perusahaan asing

KESIMPULAN

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami penurunan akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2013. Secara berturut-turut jumlah penduduk miskin sebanyak 127.510 jiwa pada tahun 2009; 113.000 jiwa pada tahun 2010; 105.867 jiwa pada tahun 2011; 101.100 jiwa pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 102.600 jiwa pada tahun 2013 dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,87 %. Urutan kecamatan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan jumlah keluarga miskin adalah Kecamatan Pulung, Balong, Sawoo, Ngrayun dan Slahung sedangkan Urutan kecamatan berdasarkan prosentase keluarga miskin adalah Kecamatan Pudak 62,97%, Kecamatan Balong 61,53%, Kecamatan Badegan 59,28%, Kecamatan Pulung 58,24%, Kecamatan Jambon 50,80% dan Kecamatan Ngrayun 49,21%. Urutan berdasarkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Program Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo adalah Kecamatan Ngrayun 33.640 RTS, Kecamatan Sawoo 21.531 RTS, Kecamatan Slahung 17.186 RTS, Kecamatan Jabon 16.458 RTS dan Kecamatan Kauman 16.103 RTS.

Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak jumlah anggaran serta program-program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Perlu adanya peningkatan jumlah program yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat miskin Klaster I. Strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang disarankan di Kabupaten Ponorogo meliputi:

- a. Meningkatkan jumlah program-program, rumah tangga sasaran dan anggaran pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat dan provinsi.
- b. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan SDM yang bersifat partisipatif dan transparan dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- c. Integrasi lintas sektor seperti sektor pertanian, peternakan dan pariwisata dan pemberian subsidi pengadaan ternak dan perbaikan pakan ternak untuk mengembangkan sistem integrasi tanaman ternak
- d. Mengembangkan budaya keunikan lokal seperti Reog sebagai icon Kabupaten Ponorogo dan mengembangkan pasar tradisional dengan membuat pasar percontohan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
- e. Pengoptimalan promosi menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan peluang pasar.
- f. Melakukan revolusi mental dengan mengubah kebiasaan menjadi budaya yang positif dan membangun kesadaran masyarakat yang kritis. Salah satunya dengan melatih TKI menjadi lebih profesional hingga aspek budaya.
- g. Peningkatan bantuan dan pelayanan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan/ permodalan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Ponorogo

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2014. Profil Kabupaten Ponorogo. Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2014. Profil Kecamatan. Ponorogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.
- Barrientos, Armando. 2010. Social Protection and Poverty. Social Policy and Development Programme Paper Number No 42.E-Paper. United Nations Research Institute for Social Development.;
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajahmada University Press.
- Kompasiana.2015. Sekilas Korelasi Kondisi Geologi dan Kemiskinan di Jawa Timur.<http://www.kompasiana.com/gayuh.putranto/sekilas-korelasi-kondisi-geologi-dan-kemiskinan-di-jawatimur>
- Mutaqien, A. 2006 .Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Purwo,A. 2012. Konsep Kebijakan. Universitas negeri yogyakarta. Yogyakarta.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2011.Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. 2010. Panduan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.